

ANALISIS ARTIKULASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALOPO

Wenny Nadya Asri¹, Haliah², Andi Kusuma³
Universitas Hasanuddin
Wennynadyaasri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan artikulasi laporan keuangan pemerintah daerah di kota Palopo. Sampel dalam penelitian ini adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kota Palopo. Metode penelitian menggunakan pendekatan dengan penerapan berbasis akrual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan dan dirancang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi secara transparan dari semua kelompok pengguna.

Kata kunci: *Artikulasi, Badan keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).*

ABSTRACT

This study aims to determine the application of articulation of local government financial statements in Palopo city. The samples in this study are Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Palopo City. The research method uses an approach with accrual-based application. The results of this study show that the Local Government Financial Statements are prepared to provide relevant information about the financial position and all transactions carried out and are designed with the aim of meeting the information needs transparently of all user groups.

Keywords : *Articulation, Badan keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).*

Pendahuluan

Laporan keuangan daerah pada dasarnya merupakan asersi atau pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu pemangku kepentingan yang ada tentang kondisi keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2011).

Menurut Mustain (2010: 30) artikulasi adalah apa yang kita definisikan sebagai struktur-struktur dalam otak yang melibatkan kemampuan bicara (area kemampuan bicara), membaca atau pemrosesan kata lainnya dan area gerak tambahan (menulis, membuat sketsa, dan gerak-gerak ekspresif lainnya). Artinya, artikulasi merujuk kepada apa-apa saja yang berkaitan dengan berbicara atau melakukan sesuatu akibat dari pemrosesan hasil kerja otak. Penerapan model artikulasi dalam pembelajaran juga melibatkan kemampuan berbicara serta gerak ekspresi akibat kegiatan berpikir siswa. Model artikulasi berbentuk kelompok berpasangan, di mana salah satu siswa menyampaikan materi yang baru diterima kepada pasangannya kemudian bergantian, presentasi di depan kelas perihal hasil diskusinya dan guru membimbing siswa untuk memberikan kesimpulan.

Artikulasi sebenarnya merupakan turunan atau konsekuensi dari konsep kesatuan usaha. Dengan artikulasi akan selalu dapat ditunjukkan bahwa laba dalam statemen laba rugi akan sama dengan laba dalam statemen perubahan ekuitas akhir dalam statemen perubahan ekuitas akan sama dengan jumlah rupiah ekuitas dalam neraca. Pendekatan asset kewajiban dan pendapatan biaya mengakibatkan pendefinisian, pengukuran dan pengakuan elemen yang

satu merupakan produk samping pendefinisian, pengukuran dan pengakuan elemen yang lainnya.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang digunakan oleh pemerintah selama satu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah diwajibkan mengikuti standar akuntansi pemerintahan sesuai peraturan pemerintah no.71 tahun 2010. Namun pada kenyataannya masih banyak organisasi di Indonesia yang memiliki kualitas informasi akuntansi yang masih rendah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2016) “Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali Yang Beropini WTP” hasil yang dilakukan oleh Firdaus menerangkan bagaimana mendefinisikan tipe ketidakartikulasian apabila LKPD mengalami kondisi tidak artikulasi yang dimana membandingkan fakta dalam lembar muka LKPD dengan kriteria yang didasarkan pada persamaan akuntansi dan standar akuntansi pemerintah (SAP). Sedangkan dalam penelitian ini yang pada artikulasi laporan keuangan pemerintah daerah Kota Palopo terfokus pada kegunaan terhadap laporan tahunan pemerintah daerah dari 27 OPD tentang PP Nomor 71 Tahun 2010 meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan. Namun, apakah LKPD hasil audit akan memberikan kebermanfaatan yang tinggi dan akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan layaknya informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan pada umumnya. Selain itu, dengan adanya laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar akan memberi informasi mengenai ekonomis, efisiensi, dan efektifitas operasional suatu entitas dan dapat menjadi dasar untuk alokasi sumber daya ekonomi.

Literatur Review dan Pengembangan Hipotesis

Teori Signaling Haryanto (2013) mengemukakan hal yang dibahas dalam teori sinyal, bagaimana seharusnya keberhasilan atau kegagalan pihak manajemen suatu organisasi baik perusahaan maupun pemerintah daerah (agen) dapat disampaikan ataupun diinformasikan kepada para pemangku kepentingan. Penyampaian laporan keuangan dianggap sebagai suatu sinyal apakah agen bertindak sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan oleh prinsipal. Black (dikutip oleh Haryanto, 2013) mengemukakan bahwa inti argumentasi dari teori sinyal ini adalah adanya dorongan dari faktor ekonomi untuk melakukan suatu hal, bahkan hal buruk sekalipun dalam rangka pembuatan laporan keuangan.

Teori signaling mengasumsikan bahwa pemerintah harus berusaha untuk memberikan dan mentransfer signal yang baik kepada masyarakat. Karena pemerintah salah satu pihak yang diberikan amanah dan tanggung jawab oleh masyarakat (Abdullah dan Halim, 2006). Signal yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yaitu berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang andal, lengkap, detail, berkualitas, dan disajikan dalam website pemerintah daerah. Suatu kinerja yang baik dari pemerintah harus diinformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban (Puspita dan Martani, 2012).

Dalam pemerintahan terdapat kinerja yang baik yaitu perlu menginformasikan kepada masyarakat, baik dalam bentuk pertanggung jawaban, laporan keuangan, dan bentuk- 15

bentuk bantuan yang digunakan dalam kesejahteraan umum (Abdullah dan Halim, 2006). Teori signaling memiliki kerangka teori yang di dalamnya menyebutkan bahwa suatu dorongan untuk memberikan informasi yaitu, terjadinya asimetri informasi antara pemerintah daerah dengan pihak luar, khususnya masyarakat. Pemerintah daerah harus mengurangi asimetri informasi yang terjadi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat (Pratama dkk, 2015).

1. Artikulasi Laporan Keuangan

Makna kata artikulasi dalam penggunaan ilmu akuntansi sebagaimana disampaikan oleh Suwardjono (2013, h. 220) sebagai berikut:

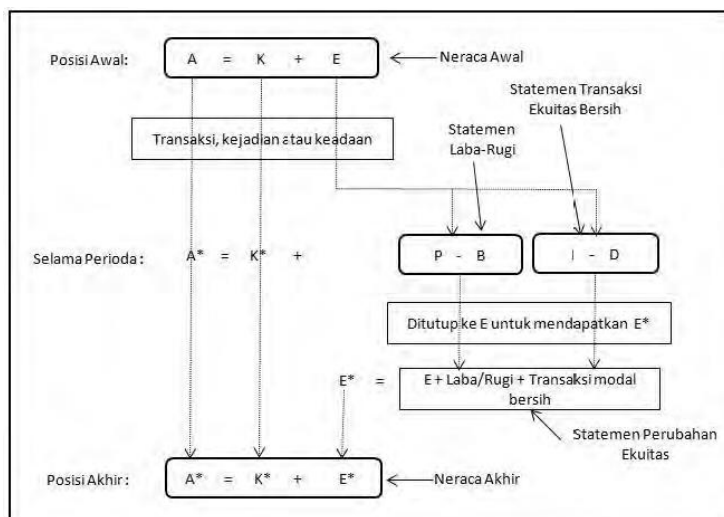
Artikulasi merupakan turunan atau konsekuensi dari konsep kesatuan usaha. Dengan artikulasi, akan selalu dapat ditunjukkan bahwa laba dalam statemen laporan realisasi anggaran akan sama dengan laba dalam statemen perubahan ekuitas dan jumlah rupiah ekuitas akhir dalam statemen perubahan ekuitas akan sama dengan jumlah rupiah ekuitas dalam neraca.

Artikulasi laporan keuangan terjadi mengingat laporan keuangan disusun dari elemen-elemen laporan keuangan yang merepresentasikan persamaan akuntansi.

Laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari akuntansi di dalamnya ada berbagai macam laporan seperti laporan realisasi anggaran, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas yang satu sama lain sangat berhubungan yang juga disebut dengan artikulasi laporan keuangan.

Artikulasi laporan keuangan dalam konteks persamaan akuntansi digambarkan oleh Suwardjono (2013, h. 221) seperti dalam gambar berikut:

Gambar 1. Artikulasi Statemen Keuangan



(Sumber : Suwardjono, 2013 h.220)

Pada gambar 1 dapat diketahui bahwa artikulasi akan terjadi saat jumlah akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas akan sama dengan jumlah ekuitas pada neraca akhir. Sedangkan jumlah ekuitas akhir dalam laporan perubahan ekuitas diperoleh dari ekuitas pada neraca awal ditambah laba/rugi dalam laporan laba-rugi dan transaksi modal bersih dalam laporan transaksi modal bersih.

Weygandt, (2013) menyatakan hubungan antar laporan keuangan tidak menggunakan kata artikulasi melainkan menggunakan kata saling berhubungan (interrelationship of statement).

Organisasi privat, perusahaan menyiapkan empat jenis laporan keuangan yaitu laporan laba-rugi (income statement), laporan laba ditahan (retained earnings statement), laporan posisi keuangan/neraca (statement of financial position/balance sheet), dan laporan aliran kas (statement of cash flows).

Mereka menjelaskan bahwa laporan laba rugi dengan laporan perubahan ekuitas saling berhubungan, karena laba/rugi yang ada di laporan laba/rugi dibutuhkan dalam membuat laporan perubahan ekuitas. Artikulasi LKPD bisa disebut sebagai hubungan/kesesuaian/pertemuan antar laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) berasal dari kata laporan keuangan dan pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan produk dari suatu proses akuntansi. Penjelasan tersebut dapat diketahui dari Ritonga (2010, h. 3) dalam mendefinisikan akuntansi yaitu:

Akuntansi adalah proses identifikasi, mencatat (jurnal), menggolongkan (posting), dan meringkas transaksi-transaksi ekonomi/keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas, serta melaporkan hasil-hasilnya didalam suatu laporan keuangan yang disebut laporan keuangan. Halim dan kusufi (2012, h. 37) menyatakan bahwa kata entitas dapat diartikan sebagai satuan organisasi. Contoh satuan organisasi adalah organisasi perusahaan dan organisasi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian analisis artikulasi menggunakan pendekatan dengan penerapan berbasis aktual. Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan data pada obyek penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti ingin memahami lebih mendalam mengenai informasi akuntansi dalam LKPD yang dipandu oleh persamaan akuntansi bahwa laporan keuangan seharusnya berartikulasi. Cresswell (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan. Sugiyono (2015) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif diterapkan/ digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah; peneliti sebagai instrument kunci; pengambilan sampel dengan cara purposive dan snowball.

Strategi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian mendeskriptifkan hasil analisis artikulasi LKPD. Peneliti kemudian menjelaskan secara sistematis fakta-fakta yang ditemukan. Peneliti menggunakan pengalamannya dan juga pengalaman para pihak yang terkait dengan penyusunan dan penyajian LKPD (Soewadji2012).

Peneliti sebagai instrument utama (sugiyono, 2015) dalam penelitian ini mengumpulkan data sekunder menggunakan teknik dokumentasi dan melakukan penggalian secara mendalam atas data sekunder tersebut. Peneliti menganalisis lembar muka (on the face) LKPD.

Hasil dan Pembahasan

Analisis terbagi dua yaitu analisis untuk Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan analisa untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Terhadap kedua laporan keuangan tersebut digunakan analisis artikulasi berbasis akrual. Laporan keuangan OPD maupun LKPD 2017 menyajikan informasi keuangan komparasi tahun 2017 dan 2016 sehingga analisis meliputi informasi keuangan tahun 2017 dan 2016. Tingkat capaian artikulasi ditunjukkan dalam bentuk persentase (%).

Tabel 1. Hasil Analisis Artikulasi Laporan Keuangan OPD Berbasis Akrual

No.	Laporan Keuangan OPD	Tingkat Capaian Artikulasi (%)
1.	Dinas Penanaman Modal & PTSP	100
2.	Dinas Ketahanan Pangan	96,67
3.	Dinas Pertanian, Peternakan & perkebunan	96,67
4.	Dinas Perikanan	96,67
5.	Dinas Koperasi & UKM	96,67
6.	Dinas Kesehatan	96,67
7.	RSUD Sawerigading	100
8.	Dinas Kebudayaan	96,67
9.	Dinas Sosial	96,67
10.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	96,67
11.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	96,67
12.	Dinas Perpustakaan	100
13.	Dinas Pendidikan	96,67
14.	Bappeda	96,67
15.	Dinas kependudukan & Pencatatan Sipil	96,67
16.	Dinas Pengendalian penduduk & KB	96,67
17.	Satua Polisi Pamong Praja	96,67
18.	Badan Penanggulangan Bencana	96,67
19.	Pemadam Kebakaran	96,67
20.	Dinas Lingkungan Hidup	96,67
21.	Dinas Perhubungan	96,67
22.	Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	100
23.	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	96,67
24.	Sekretariat Daerah	96,67
25.	Sekretariat DPR	96,67
26.	Inspektorat	96,67
27.	Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah	96,67
Rata-rata Kumulatif tingkat capaian Artikulasi		97,16

Pada 27 OPD terdapat empat Dinas dengan capaian artikulasi 100% yaitu Dinas PMPTSP, Dinas Perpustakaan, RSUD Sawerigading dan Dinas PUPR.

Hasil di atas diperoleh dari hasil analisis tingkat capaian artikulasi laporan keuangan OPD pada table 2 berikut :

NO.	OPD	Thn	Instrumen #X	Instrument #Y	Tingkat Capaian Artikulasi (%)
1.	Dinas Penanaman Modal & PTSP	2017	100	100	100
		2016	100	100	
2.	Dinas Ketahanan Pangan	2017	100	93,33	96,67

Analisis Perlakuan Akuntansi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja

© 2021 JAKOB : Jurnal Akuntansi Sektor Publik. Universitas Kadiri

Semua hak cipta dilindungi undang-undang

		2016	100	93,33	
3.	Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan	2017	100	93,33	96,67
		2016	100	93,33	
4.	Dinas Perikanan	2017	100	93,33	96,67
		2016	100	93,33	
5.	Dinas Koperasi, Usaha kecil & Menengah	2017	100	93,33	96,67
		2016	100	93,33	
6.	Dinas Kesehatan	2017	100	93,33	96,67
		2016	100	93,33	
7.	RSUD Sawerigading	2017	100	100	100
		2016	100	100	
8.	Dinas Kebudayaan	2017	100	93,33	96,67
		2016	100	93,33	
9.	Dinas Sosial	2017	100	93,33	96,67
		2016	100	93,33	
10.	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	2017	100	93,33	96,67
		2016	100	93,33	
11.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	2017	100	93,33	96,67
		2016	100	93,33	
12.	Dinas Perpustakaan	2017	100	100	100
		2016	100	100	
13.	Dinas Pendidikan	2017	100	93,33	96,67
		2016	100	93,33	
14.	Bappeda	2017	100	93,33	96,67
		2016	100	93,33	
15.	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	2017	100	93,33	96,67
		2016	100	93,33	
16.	Dinas Pengendalian Penduduk & KB	2017	100	93,33	96,67
		2016	100	93,33	
17.	Satuan Polisi Pamong Praja	2017	100	93,33	96,67
		2016	100	93,33	
18.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2017	100	93,33	96,67
		2016	100	93,33	
19.	Pemadam Kebakaran	2017	100	93,33	96,67
		2016	100	93,33	
20.	Dinas Lingkungan Hidup	2017	100	93,33	67,67
		2016	100	93,33	
21.	Dinas Perhubungan	2017	100	93,33	96,67
		2016	100	93,33	
22.	Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	2017	100	100	100
		2016	100	100	
23.	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	2017	100	93,33	96,67
		2016	100	93,33	
24.	Sekretariat Daerah	2017	100	93,33	96,67
		2016	100	93,33	
25.	Sekretariat DPR	2017	100	93,33	96,67
		2016	100	93,33	
26.	Inspektorat	2017	100	93,33	96,67
		2016	100	93,33	
27.	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	2017	100	93,33	96,67
		2016	100	93,33	

Hasil analisis di atas diperoleh dari analisis artikulasi antarpos dan antarkomponen laporan keuangan OPD .

Hasil Penelitian ini menggunakan dua analisis yaitu analisis untuk Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan analisis untuk Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD). Terhadap kedua laporan keuangan tersebut digunakan analisis artikulasi berbasis akrual. Laporan Keuangan OPD maupun LKPD tahun 2017 menyajikan informasi keuangan komparasi tahun 2017 dan tahun 2016 sehingga analisis meliputi informasi keuangan tahun 2017 dan tahun 2016. Tingkat capaian artikulasi ditunjukkan dalam bentuk persentase (%).

Artikulasi Laporan Keuangan OPD maupun LKPD dapat diartikan sebagai kondisi saling berhubungan atau keterkaitan antara komponen dalam suatu laporan keuangan (OPD maupun Pemerintah Daerah) serta keterkaitan antar pos-pos/unsur dalam suatu komponen laporan keuangan, sebagai berikut:

a. Laporan Keuangan OPD

Sejumlah 27 OPD yang dianalisis diperoleh hasil 4 OPD berartikulasi 100% yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Rumah Sakit Daerah Sawerigading, Dinas perpustakaan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 23 OPD lainnya berartikulasi 96,67 %. Kumulatif rata-rata mencapai 97,16 %. Nilai tersebut diperoleh dari analisis artikulasi antar pos dan antar komponen dalam laporan keuangan

Pada Laporan Keuangan OPD yang berbasis akrual hanya terdapat 4 (empat) komponen yaitu : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Ekuita (LPE), Neraca, dan Laporan Operasional (LO) dan Catatan atas laporan Keuangan (CaLK). Dengan demikian penentuan kriteria artikulasinya jumlahnya sedikit yaitu untuk kriteria antarpos berjumlah 6 (enam) kriteria dan untuk Antar komponen berjumlah 5 (lima) kriteria.

b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD

Dari hasil analisis Artikulasi LKPD Kota Palopo, maka diperoleh hasil capaian artikulasi 100 %. Ini berarti LKPD Kota Palopo cukup andal dan berkualitas sehingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengrcualian (WTP).

Sama dengan Laporan keuangan OPD di atas, bahwa pencapaian artikulasi tersebut diperoleh dari hasil analisis kriteria antarpos dan kriteria antar komponen

LKPD Kota Palopo merupakan akumulasi laporan keuangan OPD lingkup Pemerintah Kota Palopo. Oleh karena itu cakupannya lebih luas. Pada LKPD yang berbasis akrual terdapat 7 tujuh komponen yaitu : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dengan demikian terdapat 13 kriteria yang ditetapkan untuk analisis artikulasi antarpos dan 17 kriteria untuk analisis artikulasi antarkomponen. Oleh karena itu hal-hal yang tidak ditemukan pada laporan keuangan OPD akan ditemukan pada LKPD. Hal ini pula menjadi pertimbangan sehingga kedua jenis laporan keuangan tersebut menjadi obyek penelitian, karena sangat dipahami keduanya mempunyai kaitan yang erat dan tidak terpisahkan.

c. Tipe ketidakartikulsian.

Pada laporan keuangan OPD ditemukan ketidakartikulsian dengan 2 tipe dan sebanyak 23 kejadian. Tipe pertama ditemukan Nilai Akumulasi Penyusutan aset Lain-lain(aset tak berwujud) di Neraca Tahun 2016 tidak sama dengan nilai akumulasi di Neraca tahun 2017, dengan satu kejadian. Hal ini disebabkan Karena aset lain-lain (aset tak berwujud) dimaksud, dimutasi kedinas lain sebagai kosekwensi pemekaran OPD tahun 2017. Dan dinas baru dimaksud tidak masuk sebagai obyek penelitian. Tipe kedua adalah Tidak mencantumkan nilai aset lain-lain (aset tak berwujud) di Neraca baik tahun 2017 maupun

2016. Pada kasus ini terdapat 22 kejadian. Namun semua kasus ketidakartikulasian pada laporan keuangan OPD tersebut terjawab pada LKPD bahwa semua asset tersebut tercatat dan tertartikulasi dengan baik pada LKPD.

Sebagai LKPD yang andal, berkualitas, merupakan pertanggung jawaban kepada masyarakat yang berisikan data-data tentang kemajuan yang telah dicapai saat ini dan gambaran tentang prospek pencapaian target-target dimasa akan datang. Dengan melalui publikasi yang baik maka informasi ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, dan akan menumbuh kembangkan dunia investasi pada daerah tersebut. Hal ini telah dikemukakan beberapa ahli dalam teori signaling.

Sehingga artikulasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) bisa diartikan sebagai kondisi saling berhubungan atau keterkaitan antar komponen dalam suatu LKPD maupun antarpos-pos/unsur dalam suatu komponen LKPD. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Firdaus pada tahun 2014 sebelumnya, bahwa keartikulasian LKPD tidak menjamin terbebas dari kesalahan artikulasi dengan adanya laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar yang memberi informasi mengenai ekonomis, efesiensi, dan efektifitas operasional suatu entitas dan dapat menjadi dasar untuk alokasi sumber daya ekonomi.

Kesimpulan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki makna dan urgensi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana secara substansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial ekonomi wilayah sebagai salah satu indikator untuk kemajuan dan perkembangan suatu daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan dan dirancang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi secara transparan dari semua kelompok pengguna.

Pada basis akrual, komponen laporan keuangan bertambah yaitu munculnya Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Selain itu, adanya perubahan perlakuan pengakuan berbasis akrual terhadap pos-pos di masing-masing laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah sejak tahun 2016 telah menyusun dua laporan keuangan baru yang muncul akibat implementasi SAP Akrual yaitu Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pos-pos pada laporan keuangan pemerintah daerah pun diakui berdasarkan SAP basis akrual yang berlaku pada PP No. 71 Tahun 2010.

Saran

Mengingat bahwa PP No. 71 Tahun 2010 mengenai Artikulasi LKPD basis akrual akan diwajibkan di tahun 2015 ini, maka dari hasil analisis dan kesimpulan, beberapa saran yang dapat diajukan adalah:

1. Untuk Pemerintah Kota Palopo, bahwa Pengelolaan aset di tingkat OPD sebagian masih lemah sehingga perlu pembinaan (kursus dan pelatihan pengelolaan asset atau barang) dan peningkatan kapasitas dari pihak terkait.
2. Untuk peneliti selanjutnya diusulkan untuk memperluas ruang lingkup penelitian meliputi seluruh OPD yang ada di Kota Palopo atau beberapa kabupaten kota dengan tahun anggaran laporan keuangan berikutnya.

Daftar Pustaka

- Firdaus. 2014. **Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**
- Halim, Abdul. 2007. **Akuntansi Keuangan Daerah**. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim Abdul. 2012. **Akuntansi sektor publik, teori konsep dan aplikasi**. Jilid 1. Salemba Empat. Indonesia
- Hartati, Yenni. 2011. **Analisa Pengungkapan Laporan Keuangan Opini Wajar Tanpa Pengecualian**.
- I Gusti Agung, 2008. **Audit Kinerja pada Sektor Publik**. Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir. 2011. **Analisis Laporan Keuangan**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi, 2007, **Analisis laporan keuangan pemerintah daerah: Panduan bagi eksekutif, DPRD, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, UPP STIM YKPN**, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Marjulin. 2012. **Analisa Pengungkapan Laporan Keuangan Banda Aceh dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian** Politeknik Negeri Lhokseumawe Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 1.
- Muttaqin, R., A. Djamhuri dan Y. W. Prihatiningtias. (2015). **Upaya Penerapan Akrual dan Perolehan Opini WTP di Kota Pekalongan dari Kacamata Kurt Lewin**. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 19, Nomor 4, Desember 2015 : 516 – 536 ISSN 1411 – 0393. Desember 2015.
- Niu, F.A.L., H. Karamoy dan S. Tangkuman. (2014). **Analisis Penerapan PPNomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu**. Jurnal EMBA Vol.2 No.4 Desember 2014, Hal. 714-722. Desember 2014.
- Novi Priyati. 2013. **Pengantar Akuntansi**. Jakarta: Indeks.
- Nurhikmah, Nunung. (2016). **Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Sebelum dan Sesudah Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah di Indonesia**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 **Tentang Standar Akuntansi Pemerintah**
- Peraturan Pemerintah no. 8 Tahun 2006 **tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 13**
- Ratmono, D. & Sholihin, M., 2015, **Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual**, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Rini Adhriani Sarah. 2014. **Opini Audit Dan Pengungkapan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serta Kaitannya Dengan Korupsi Di Indonesia**. Jurnal Etikonomi Vol.13 No.1.
- Ritonga, I.T., 2010, **Reviu laporan keuangan pemerintah daerah**, LKMPD, Yogyakarta.
- Sukrisno Agoes . 2012. **Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik**. Jakarta: Salemba Empat.
- Suwardjono. 2008. **Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan**. Yogyakarta: BPFE.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 **tentang keuangan negara**
- Weygandt, J.J., Kimmel, P.D. & Kieso, D.E., 2013, **Financial Accounting IFRS 2nd Edition**, John Wiley & Sons, New York.